



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Nyaman No. 1 Kel. Tengah Kec. Cibinong Telp. 021 8753191

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Nomor : 421.3/ 04 - Dikmen

TENTANG :

IJIN PENDIRIAN

**SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) AVICENNA MANDIRI
JALAN DESA BANTARSARI No. 46 RT. 03/04 DESA BANTARSARI
KECAMATAN RANCABUNGUR KABUPATEN BOGOR**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR :

- Menimbang** : a. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dibidang pendidikan, perlu memberikan Ijin Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) AVICENNA MANDIRI, yang berlokasi di Jalan Desa Bantarsari No.46 Rt.03/04 Desa Bantarsari, Kecamatan Rancabungur Kabupaten Bogor;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, tentang Ijin Pendirian (Sekolah Menengah Kejuruan) SMK AVICENNA MANDIRI, Bidang Studi Keahlian : Teknologi Informasi dan Komunikasi, Bisnis dan Manajemen;
1. Program Studi Keahlian : Teknik Komputer dan Informatika, Keuangan;
2. Paket Keahlian : Teknik Komputer dan Jaringan, Akuntansi;
- yang berlokasi di Jalan Desa Bantarsari No. 46 Rt 03/04 Desa Bantarsari Kecamatan Rancabungur Kabupaten Bogor;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, tentang Pemerintah Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor : 8);
2. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang, Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003, Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang, Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 8 tahun 2005 tentang penetapan
4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang, Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang, Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang, Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang, Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor : 41) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013, tentang Standar Pendidikan Nasional;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008, tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : ~~060/U/2002 Tanggal, 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;~~
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007, tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 tahun 2006, tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008, tentang Susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2008);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2011, tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Daerah kabupaten Bogor Nomor 56).
19. Keputusan Bupati Bogor Nomor 11 Tahun 2004 tentang Pedoman Ijin Pendirian Sekolah;
20. Keputusan Bupati Bogor Nomor 061/188/Kpts/HUK/2005, tanggal 30 Mei 2005 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Administrasi Pelayanan Umum Kepada Kepala Dinas Pendidikan;
21. Peraturan Bupati Bogor Nomor 41 Tahun 2013, tentang Tata Cara Pendirian, Penggabungan, Perubahan Nama, dan Pencabutan ijin Sekolah.

- Memperhatikan :
1. Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor : C-HT.01.09.190, tanggal 10 April 2007, perihal Yayasan Wakaf Mathla'ul Anwar Nurul Kamal (terdaftar);
 2. Surat Keputusan Pengurus Yayasan Wakaf Mathla'ul Anwar Nurul Kamal, Nomor : 037/SK-YAWAKAF/II/2014 tanggal 15 Februari 2014 tentang Pembukaan dan Pendirian SMK Akademi Maunah Bantaran Rancabungur Bogor;

3. Surat dari Yayasan Wakaf Mathla'ul Anwar Nurul Kamal, Nomor : 020/YAMANKA/XI/2014, tanggal 18 November 2014, perihal Permohonan izin Operasional SMK Avicenna Mandiri;
4. Surat Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bogor Nomor :563/2281-Penlatkertrans/2014, tanggal, 19 Maret 2014, perihal Rekomendasi Pendirian SMK Avicenna Mandiri;
5. Surat Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bogor, Nomor : 422.5/14-Umpeg, tanggal 8 Januari 2015, perihal Rekomendasi;
6. Surat Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Bogor, Nomor : 422/1238.1/Rek/2014, tanggal 24 Desember 2014, perihal Rekomendasi;
7. Surat Keterangan Dukungan/Kerjasama dari :
 - LIGHT COMPUTER, Nomor : 02/SMK Avicenna Mandiri/9/2014, tanggal 23 September 2014, dalam rangka Prakerin dan Ujikom Pendidikan Sistem Ganda (PSG);
 - Bank BRI Unit Semplak, Nomor : 021/SMK-AM/XII/2014, tanggal 16 Desember 2014, dalam rangka Program Praktek Industri.
8. Surat Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Kabupaten Bogor Nomor : 001/DP/IV/2014, tanggal, 3 April 2014, perihal Rekomendasi Ijin Pendirian SMK;
9. Surat UPT Pendidikan Kecamatan Rancabungur, Nomor : 642/32-UPTP, ~~perihal Permohonan Rekomendasi;~~
10. Surat Camat Rancabungur, Nomor : 422.5/02-Kesra, tanggal 13 Maret 2014, perihal Rekomendasi Pendirian SMK Avicenna Mandiri;
11. Surat Kepala Desa Bantarsari Nomor : 07/02/III/2014, tanggal 10 Maret 2014, perihal Rekomendasi Pendirian SMK Avicenna Mandiri;
12. Berita Acara Musyawarah Tim Penilai Ijin Pendirian SMK Avicenna Mandiri, hari Selasa, 30 Desember 2014;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
PERTAMA

- : Memberi Ijin kepada,
Nama Yayasan : **WAKAF MATHLA'UL ANWAR NURUL KAMAL**
Alamat : Jalan Desa Bantarsari No. 44 Rt 03/04 Desa Bantarsari, Kecamatan Rancabungur, Kabupaten Bogor;
- Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Menengah Kejuruan :
- N a m a : **SMK AVICENNA MANDIRI**
Alamat Sekolah : Jalan Bantarsari No. 46 Rt 03/04, Desa Bantarsari Kecamatan Rancabungur Kabupaten Bogor;
- Bidang Studi Keahlian : **Teknologi Informasi dan Komunikasi, Bisnis dan Manajemen;**
Program Studi Keahlian : **Teknik Komputer dan Informatika, Keuangan**
Paket Keahlian : **Teknik Komputer dan Jaringan, Akuntansi.**
Mulai Tahun Ajaran : 2014 / 2015

KEDUA

- : Pemberian Ijin sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA, berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (*Her Registrasi*) setiap awal Tahun Pelajaran kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, penyelenggara Pendidikan atau Satuan Pendidikan diharuskan :
- a. menjamin peserta didik memperoleh akses pelayanan pendidikan bagi peserta didik yang orang tua / walinya tidak mampu membiayai pendidikan, baik peserta didik pendidikan berkebutuhan khusus, maupun peserta didik di daerah khusus;
 - b. melakukan dan atau memfasilitasi perjaminan mutu pendidikan di satuan atau program pendidikan dengan berpedoman kepada Standar Nasional Pendidikan;

- c. memfasilitasi pembinaan berkelanjutan kepada peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mencapai prestasi puncak di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga pada tingkat Satuan Pendidikan, Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi, Nasional dan Internasional.
- d. mengembangkan dan melaksanakan sistem informasi pendidikan pada satuan pendidikan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
- e. menjamin jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan;
- f. menjamin sarana dan prasarana pendidikan yang didirikan di atas tanah milik sendiri atas nama yayasan dan atau cara lain yang sesuai dengan peraturan/perundang-undangan yang berlaku, tidak sengketa, dan tidak digunakan untuk kegiatan lain selain kegiatan proses pembelajaran;

- KETIGA** : Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan, satuan pendidikan dimaksud pindah alamat, berganti yayasan dan atau dipindahtangankan kepada yayasan lain, maka keputusan ini batal dengan sendirinya dan harus mengulang mengajukan ijin pendirian sekolah baru;
- KEEMPAT** : Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya kegiatan pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang ijin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan/atau batal demi hukum.
- KELIMA** : Segala penyimpangan dan/atau kelalaian atas diktum KEDUA, KETIGA dan KEEMPAT keputusan ini, baik disengaja maupun tidak disengaja sehingga merugikan kewibawaan Pemerintah Kabupaten Bogor, maka Surat Keputusan ini batal demi hukum;
- KEENAM** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini, menjadi beban dan tanggung jawab pihak penyelenggara Satuan Pendidikan;
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Cibinong
 Pada Tanggal : 02-02- 2015



KEPALA,

DACE SUPRIADI, SH, M.Si

Pembina Tk I

NIP. 196301021986031017

Tembusan :

1. Yth. Direktur Jenderal Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia;
2. Yth. Gubernur Jawa Barat;
3. Yth. Bupati Bogor Melalui Sekretaris Daerah (sebagai laporan);
4. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
5. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor;
6. Yth. Inspektur Kabupaten Bogor;
7. Yth. Camat Rancabungur;
8. Yth. Kepala UPT Pendidikan Kecamatan Rancabungur;
9. Yth. Kepala Desa Bantarsari Kecamatan Rancabungur;